

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari *capital intensity*, manajemen laba dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Dalam mengukur variabel dependen yaitu *tax avoidance*, peneliti menggunakan tiga jenis *proxy* seperti ETR, CETR dan BTD yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing masing sudut pandang *proxy* itu sendiri. Selain itu, pada variabel independen berupa komisaris independen, peneliti menggunakan dua jenis *proxy* yang terdiri dari kualitas komisaris independen dan proporsi komisaris independen.

Penelitian ini menggunakan 59 perusahaan sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024, sehingga total data observasi penelitian ini berjumlah sebanyak 180 data observasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut merupakan hasil dari masing masing variabel tersebut :

1. Hipotesis pertama (H_1) : Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima pada model ETR dan CETR. Namun pada model BTD ditemukan hasil sebaliknya yaitu *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada pendekatan pengukuran yang digunakan.
2. Hipotesis kedua (H_2) : Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak pada ketiga model yang ada. Dalam model ETR, diperoleh hasil berupa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada model CETR dan BTD, ditemukan hasil berupa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ini bukan menunjukkan ketidakkonsistenan, tetapi menunjukkan kompleksitas perilaku *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh sensitivitas masing-masing model.

3. Hipotesis ketiga (H_3) : Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan melalui dua *proxy* variabel ini ditemukan hasil berupa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut ditemukan pada ketiga model yaitu ETR, CETR dan BTD. Hal ini terjadi karena meski dalam sebuah unit bisnis, komisaris independen berperan sebagai pengawas namun yang memegang Keputusan teknis khususnya strategi perpajakan adalah manajemen. Dengan begitu adanya komisaris independen baik dari segi kualitas maupun proporsi tidak terlalu mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti. Adapun keterbatasan tersebut sebagai berikut :

1. Tidak semua perusahaan sampel yang ada dalam sektor energi mempublikasi laporan keuangan dan tahunan secara lengkap.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, terlihat dari rendahnya nilai *R-square* pada ketiga *proxy tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan *tax avoidance* masih rendah, sehingga sebagian besar faktor lain diluar model belum dianalisis pada penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya :

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap *tax avoidance*, seperti transfer pricing, sales growth, leverage, dan variabel relevan lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas temuan penelitian dengan menambahkan variabel moderasi maupun variabel kontrol, serta memperluas cakupan sektor penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

2. Bagi Perusahaan :

Perusahaan diharapkan mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku guna menghindari risiko hukum dan reputasi. Selain itu, peneliti berharap setiap perusahaan dapat lebih terbuka dalam menyajikan setiap laporan keuangan dan tahunan secara lengkap kepada publik, sehingga transparansi dapat tercipta.

3. Bagi Pemerintah :

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi perpajakan, khususnya terhadap *tax avoidance*, melalui peningkatan kualitas pemeriksaan pajak dan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar celah peraturan dapat diminimalkan.